

BAB IV

DINAMIKA TRANSFORMASI SOSIAL DAN POLITIK DINASTI

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai analisis dari kasus yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, berdasarkan data-data yang diperoleh dari bab sebelumnya

4.1. Oligarki

Keberadaan Keluarga ataupun orang dekat dalam Pilkada akan menguatkan cengkaman oligarki politik maupun dinasti politik. Menggeliatnya sepak terjang dari oligarki memberikan kesempatan kepada “orang kuat lokal” untuk menancapkan cengkramannya lebih dalam, dengan tujuan mencengkram eksistensi mereka di berbagai sudut dan dimensi kehidupan ekonomi politik. Praktik politik oligarki diyakini kuat seiring dengan penyelenggaraan Pilkada yang bersumber dari beberapa faktor seperti penguasaan secara politik dan ekonomi, atau karena biaya politik yang cukup tinggi sehingga kepemilikan terhadap modal finansial menjadi suatu keistimewaan.

Kondisi tersebut mampu membiarkan oligarki mampu bertransformasi menyesuaikan karakteristik pemerintahan demokrasi untuk dapat tetap bertahan bahkan mampu mengakar kuat secara sistemik dalam sistem perpolitikan Indonesia saat ini. Pemilihan Kepala Daerah saat ini sudah menjadi syarat akan adanya kepentingan golongan. Bahkan, sekalipun dipilih langsung oleh rakyat, Pilkada tetaplah Pilkada yang tidak

terlepas dari pertarungan kekuasaan dan perebutan dukungan dari banyak pihak baik elite, aktor partai politik, kelompok non- pemerintahan maupun masyarakat setempat. Berbagai cara diperlukan untuk memenangkan posisi strategis dengan segala *privilege* yang ditawarkan. Pada dasarnya Oligarki itu sendiri diekspresikan oleh keluarga , pebisnis, dan para aktor politik yang dapat menggabungkan beberapa sumber yang kuat tersebut.

Fenomena hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik di tingkat lokal semakin menguatkan gejala dinasti politik. Salah satu pola yang dilakukan oleh petahana untuk mempertahankan kekuasaan adalah petahana berupaya untuk mempertahankan panggung politiknya melalui pilkada selanjutnya dengan menempatkan orang-orang terdekat untuk melanjutkan, pola ini biasanya terjadi ketika petahana tidak bisa lagi maju di kontestasi pilkada selanjutnya, hal ini dikarenakan adanya batasan masa jabatan yaitu dua periode, namun hal lain adanya keinginan untuk melanjutkan program-program yang belum selesai oleh petahana, yang pada akhirnya keluarga dan kerabat menjadi pilihan satu-satunya untuk melanjutkan estafet pemerintahan, dan tidak sedikit kerabat atau keluarga dari petahana sukses memenangi kontestasi Pilkada.

Kemenangan politik Ipuk Fiestiandani dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 memperlihatkan beberapa hal yang *Pertama* , adanya jaringan kekuasaan yang dimiliki elit lama yang terdiri dari anggota keluarga dan orang-orang dekat yang masih efektif digunakan untuk memenangkan kontestasi dan memperebutkan kekuasaan melalui kontestasi

Pilkada. *Kedua*, kekuatan elit lama semakin meluas dengan bergabungnya orang-orang dan organisasi-organisasi masyarakat serta jaringan partai politik yang dimiliki oleh elit lama yang berpotensi kuat dalam kemenangan, serta menjadi bagian dari jaringan kekuasaannya. *Ketiga*, demokrasi dianggap memberikan kesempatan bagi elit lain untuk memegang jabatan politis, kenyataannya justru memperkuat hegemoni elit lama terhadap jabatan tersebut, justru elit baru tersebut adalah bagian dari elit lama yang dekat dan memiliki potensi kuat dengan elit lama.

Sehingga orang-orang yang berada dalam jaringan kekuasaannya merasa berkepentingan untuk terus mendukung dan mempertahankan jabatan kepala daerah, untuk menjamin keberlanjutan program yang sudah dibangun oleh elit lama. Dalam sistem politik selalu memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan dan penguasa. Oleh karena itu, manusia akan saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan melalui suatu mekanisme yang dinamakan politik untuk memperoleh, mempengaruhi, mempertahankan, dan mendistribusikan kekuasaan. Namun terkadang hubungan politik ini malah bersifat patronase politik.

Keinginan untuk melanjutkan transformasi politik melalui kinerja-kinerja sebelumnya, juga diiringi dengan konsep neopatrimonial dengan memusatkan sosok atau figur yang lama dalam regenerasi kekuasaan, rezim politik ini terbentuk dikarenakan adanya *concern* yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasinya adalah kekuasaan. Namun terdapat beberapa pertimbangan yang diharapkan dari

kinerja seorang kepala daerah untuk dapat dijadikan figur politik seperti pemberian pelayanan public yang memuaskan , pengurangan beban pemerintahan pusat dan penumbuhan kemandirian serta kedewasaan daerah, secara ideal kepala daerah sebelumnya akan menunjuk atau memberikan rekomendasi seseorang yang mampu meneruskan jabatan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan diatas, dengan pengetahuan kinerja dan program kerja.

Hubungan ini melahirkan jaringan atau ikatan patronase melalui hubungan dengan pemimpin sebelumnya (suaminya), dimana hubungan ini diperoleh melalui hubungan kekeluargaan dengan status ikatan perkawinan suami dan istri. Pola hubungan ini mampu memperkuat kedudukan Ipuk dalam Pilkada, adanya keinginan yang didasari untuk melanjutkan program dan kinerja yang dijalankan oleh Istri atau anggota keluarga , sehingga proses ini akan mengarahkan pada kekhawatiran kepentingan golongan yang bertujuan mempertahankan kekuasaan. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut, pola dan relasi yang terbentuk melalui basis suami dan istri menjadi kekhawatiran adanya pendistribusian kepentingan. Selain itu, fenomena politik kekerabatan sering dianggap sebagai penghambat demokrasi karena tidak ada terjadi sirkulasi elite.

Namun kondisi ini nyatanya justru dikuatkan melalui dukungan masyarakat Kabupaten Banyuwangi bahwasanya masyarakat Kabupaten Banyuwangi menginginkan sosok atau pemimpin yang berasal dari keluarga yang sama, kualitas kandidat didasarkan pada hubungan kekeluargaan dengan pemimpin sebelumnya. Panggilan hati nurani masyarakat ini juga didasarkan pada pembangunan program berkelanjutan dan kemampuan Anas dalam memupuk kepercayaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Situasi ini menawarkan beberapa kemungkinan dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, bahwa transformasi sosial dari Anas kepada Ipuk melalui kebijakan dan program-program sebelumnya justru melahirkan patronase politik melalui hubungan kekeluargaan dengan status sebagai istri Anas yang akan memberikan fondasi kuasa politik di Kabupaten Banyuwangi. Disisi lain, pola seperti ini justru tidak sehat bagi demokrasi karena tidak memberikan ruang untuk muncul figur baru selain keluarga mereka, namun dalam praktiknya upaya dalam transformasi ini juga didukung oleh peran daripada masyarakat dalam memilih pemimpin bahwasanya masyarakat menginginkan kelanjutan dari program-program sebelumnya untuk dilanjutkan kembali oleh calon pemimpin yang berasal dari keluarga yang sama, hal ini dikarenakan masyarakat atau dalam konteks pemilih menginginkan sosok serupa dengan Anas untuk dapat melanjutkan keberhasilan di Kabupaten Banyuwangi.

Merujuk realita diatas, kondisi seperti ini justru akan memberikan masalah baru di Kabupaten Banyuwangi , pasalnya transformasi sosial yang dilanjutkan oleh Ipuk justru melahirkan patronase yang dimana patronase politik tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi, melalui hubungan ini maka nilai demokrasi yang sesungguhnya semakin tergerus, dengan begitu patronase atau hubungan yang kuat maka akan menyebabkan matinya demokrasi di tingkat lokal , pola tersebut juga akan menutup celah sosok pemimpin baru di Kabupaten Banyuwangi.

Namun dalam prakteknya, fenomena ini juga dikuatkan oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang memilih Ipuk yang didasarkan dengan sosok Anas , dimana kualitas kandidat tersebut diukur dengan pengalaman politik pemimpin sebelumnya, serta ungkapan transformasi yang dilanjutkan oleh lingkungan keluarga dari anas dengan kebijakan-kebijakan dan program sebelumnya. Dengan mengacu pada permasalahan tersebut, fenomena keluarga politik dalam memperoleh jabatan akan selalu beragam, beragam pula masalah yang ditimbulkan.

4.2. Tantangan Demokrasi Lokal ke Depan

Demokrasi merupakan salah satu alternatif baru bagi perjalanan kehidupan bernegara dengan mengusung tema dari dan oleh rakyat , hal ini juga ditandai dengan hadirnya fenomena pergantian pemimpin pada tingkat nasional dan local. Seperti halnya tujuan pilkada yang tujuan utamanya agar rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pada umumnya demokrasi merupakan salah satu bentuk dari kebijakan

desentralisasi yang sangat penting bagi kelangsungan demokrasi lokal dan merupakan salah satu bentuk transfer kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab dan sumberdaya dari negara ke pemerintah local. Namun dalam pelaksanaannya justru memunculkan pro dan kontra, pasalnya kebijakan desentralisasi ini justru menjadi transformasi politik elite saja, dimana para elit seringkali menancapkan keluarga atau kerabat dalam ranah politik untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan politiknya.

Pandangan mengenai demokrasi ini sering digunakan untuk mengamati fenomena politik kekerabatan, konsep demokrasi dimaksudkan sebagai kesetaraan masyarakat dalam memperoleh kesetaraan yang sama, namun fenomena politik kekerabatan sering dianggap sebagai penghambat demokrasi karena tidak terjadi sirkulasi elite. Idealnya demokrasi dapat menjadi acuan kehidupan kebangsaan dalam segala level, baik dalam tingkat masyarakat maupun pemerintah. Demokratisasi adalah sebuah gagasan, perumusan dalam sebuah ide, perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik di tingkat lokal akan menunjukkan kualifikasi demokrasi pada pemerintah akan saling berkaitan. Selain itu pemerintah membuka ruang partisipasi publik, hal ini menunjukkan sejauh mana gagasan diolah bersama dan diimplementasikan kedalam kebijakan yang diawasi oleh masyarakat dan itu semua adalah serangkaian proses demokratisasi itu sendiri.

Secara konstitusi di Indonesia tidak ada pembatasan hak untuk berpolitik bahkan seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana, seperti adik, kakak, Istri, menantu, atau keluarga lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses jabatan public, namun

kekhawatiran hasrat dalam berkuasa menjadi salah satu masalah dalam public. Sehingga dalam perjalanan demokrasi ternyata harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, karena cukup banyak kegiatan politik Indonesia yang kurang sesuai dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi yang ada. Sehingga hal ini menyulitkan demokrasi sehingga muncul beberapa tantangan demokrasi yang akan datang:

Terdapat beberapa tantangan dalam demokrasi lokal ke depan dari pola patronase yang pertama (1) Kecenderungan dan semakin menguatnya peluang patronase hal ini dideterminasi oleh peluang yang ada, baik melalui pilkada secara langsung maupun pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka melalui suara terbanyak, selain itu didukung dengan munculnya partai baru yang dapat dimanfaatkan keluarga politik dengan cara mengoptimalkan jaringan politiknya maupun social untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan jumlah yang besar. Kedua (2) Kesamaan afiliasi politik dengan keluarga politik juga akan membentuk hubungan yang bersifat oligarkis, dengan begitu peluang kandidat didukung oleh partai politik juga semakin besar. Ketiga (3) Latar belakang pencalonan dari partai politik yang menitikberatkan pada popularitas dari keluarga petahana dalam merekrut kandidat menjadi bukti bahwa proses dilakukan bukan berdasarkan kualitas dan kapabilitas kandidat, yang mana seharusnya penjaringan partai politik untuk memilih pemimpin yang berkualitas justru sangat berbeda dengan apa yang disuguhkan kepada masyarakat.

Keempat (4) Bahaya patronase politik pada tingkat Pemilihan kepala desa nyatanya sudah menjadi mengakar kuat sehingga patronase bisa berkoeksistensi dengan demokrasi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terjadinya defisit demokrasi karena patronase mencerminkan ketimpangan kultural jangka panjang. Hubungan ini mungkin akan tetap menjadi faktor utama dalam demokrasi di Indonesia untuk jangka panjang dan masa depan.

4.3. Kontekstualitas Patronase Politik dan Transformasi Sosial

Berdasarkan fenomena di Pilkada Kabupaten Banyuwangi diatas, mengisyaratkan bahwa patronase dianggap sebagai penyebab rusaknya tatanan demokrasi, maka formula dalam mengontrol patronase adalah kandidat kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan yang diartikan dengan hubungan kekerabatan dengan petahana. Kehadiran keluarga dalam kontestasi pilkada secara hukum tidak melanggar, tetapi secara demokrasi tentunya tidak akan sehat dan tidak baik, hal ini dikarenakan melalui kehadiran keluarga dalam kontestasi Pilkada tidak memberikan ruang untuk muncul figur lain selain keluarga mereka.

Oleh karena itu, tantangan tersebut menjadi tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat dengan cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal. Hal ini tentu akan membuat praktik demokrasi yang berjalan mengalami kemunduran dikarenakan adanya pertarungan kelompok elit tertentu sehingga tidak menampilkan pertarungan demokrasi yang sesungguhnya. Kecenderungan dalam membentuk sebuah pola politik keluarga juga akan membawa dampak yang tidak baik bagi demokrasi, yang mana kontrol check and balances pemerintahan sangat diperlukan. Selain itu, proses semacam ini juga akan semakin membuka peluang untuk kembali

terbentuknya oligarki politik pada tingkat lokal. Persisnya fenomena Pilkada Kabupaten Banyuwangi menandakan bahwa kekuatan politik petahana dan jejaring familisme berpengaruh besar dalam suksesi Ipuk Fiestiandani, tidak heran jika pendekatan yang dilakukan oleh Ipuk adalah sebagai bentuk dukungan terhadap program- program yang sudah digagas oleh Anas selama ini. Melalui kedekatan dengan status social Ipuk sebagai istri Anas diwujudkan sebagai bentuk patronase kekuasaan yang sudah dijalankan oleh suaminya kemudian ditransformasikan dalam bentuk program dan kinerja untuk dilanjutkan kembali oleh Ipuk.

Manifestasi politik Anas nyatanya memberikan sebuah peluang Ipuk untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik dalam pengusungnya, selain itu figur dan popularitas Anas jauh lebih lama dikenal oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, kandidat dari keluarga politik biasanya mempunyai modal politik yang memadai yang terdiri dari jaringan politik, pendidikan, pengalaman, dan sumber daya keuangan. Dimensi proses ini merupakan domain dari proses rekrutmen politik yang kualifikasinya seringkali tidak sejalan dengan logika electoral dimana partai politik dimana partai politik mengandalkan popularitas kandidat dan petahana yang mana masih dalam satu lingkup keluarga . Dilihat dari sudut pandang demokrasi praktik seperti ini sah-sah saja dilakukan oleh seseorang yang memiliki popularitas dan kemampuan dalam memperoleh dukungan public.

Namun yang akan menjadi kekhawatiran dari praktek ini adalah adanya kemungkinan terjadinya konflik kepentingan , dimana petahana mempunyai peluang dalam menyalahgunakan kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Dengan demikian hal ini justru akan mencerminkan sistem demokrasi yang

terpolarisasi oleh bayang-bayang warisan otoritarianisme demokrasi di level local. Patronase seringkali dikaitkan dengan hubungan politik dinasti, hal ini dikarenakan patronase memicu sebuah hubungan yang berantai dari keluarga tertentu secara turun temurun melalui Istri, Adik, Anak. Bahkan jika kekhawatiran dari hubungan ini memicu terjadinya monopoli kekuasaan dalam di tingkat lokal yang berorientasi pada ekonomi dan menimbulkan terjadinya korupsi keluarga.

Namun yang perlu diketahui hubungan patronase bukan satu-satunya pemicu rusaknya demokrasi, hal ini tentunya akan menjadi tolak ukur partai politik maupun masyarakat bahwa sepanjang calon pemimpin memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kepercayaan maka tak elok jika menganggap patronase sebagai hal yang negatif. Selain itu sosial masyarakat sudah menjadi bagian yang menyatu dengan kekeluargaan kepemimpinan tersebut, dimana masyarakat menempatkan kepercayaan penuh pada kepemimpinan keluarga pada satu garis keturunan tertentu. Maka yang terjadi adalah sistem pengendalian ataupun pengaturan dari sistem sosial akan lebih mudah dilakukan.

Praktik patronase di Kabupaten Banyuwangi ini tampaknya menjadi menarik itu dibahas, keberadaan Ipuk sebagai Istri Anas akan memberikan jalan tengah untuk maju dalam kontestasi yang bernama Pilkada. Ipuk sebelumnya memulai karir sebagai Istri bupati yang aktif di berbagai organisasi, Ipuk juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, anggota Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan, Ketua Yayasan Bunda PAUD Banyuwangi, serta Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Banyuwangi, dan beberapa prestasi yang didapatkan selama ia

menjabat organisasi. Diantaranya prestasi Ipuk adalah penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN tahun 2016, yakni penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat melalui BKKBN RI kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap program Keluarga Berencana (KB). Selain itu background pendidikan Ipuk adalah berfokus pada kaum difabel, kepercayaan ini semakin menguatkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Stigma negatif tentang prestasi Kabupaten Banyuwangi mulai merosot saatnya ditepis Ipuk satu persatu, bukti lain prestasi Ipuk setelah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Banyuwangi ialah, berbagai prestasi dan penghargaan yang mentereng disabet oleh Kabupaten Banyuwangi. Pertama kalinya, dua bulan setelah kepemimpinan Ipuk, Kabupaten Banyuwangi meraih dua penghargaan sekaligus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Kala itu, Kabupaten *the Sunrise of Java* ini dianugerahi penghargaan sebagai pembina terbaik tempat pengelolaan pangan (TPP) dan inovator pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas melalui inovasi Teropong Jiwa atau Terapi Okupasi dan Pemberdayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Selain itu pada akhir tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi mendapatkan tujuh penghargaan yang diraih Pemkab Banyuwangi pada Desember ini meliputi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik pertama pada tahun 2021 (dua tahun berturut-turut). Kemudian penghargaan sebagai Badan Publik menuju Informatif. Juara I Anugerah Desa Wisata yang disabet Desa Tamansari, Kecamatan Licin; Natamukti Award 2021, *The Most Popular Leader on Social Media*; dan *Smart City Award* kategori *Smart Economy*. Secara langsung korelasi dengan politik keluarga tersebut hanya digunakan sebagai *entry point* untuk masuk dalam tataran

pemerintahan, meskipun banyak yang mengungkapkan bahwa hubungan patronase tersebut mampu memperkuat sistem politik dinasti di Kabupaten Banyuwangi, namun bertahanya prestasi dan penghargaan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi tidak mengubah sedikitpun pengaruh dari pola patronase. Hanya saja, pola hubungan tersebut terkesan sangat buruk bagi demokrasi, karena hanya mengandalkan hubungan dengan keluarga, hubungan darah, dan nama besar keluarga untuk dapat menguasai daerah dari satu keturunan yang sama. Namun fenomena pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi tidak terjadi keburukan, prestasi dan penghargaan yang sebelumnya dipimpin oleh Anas mampu bertahan di tangan Ipuk , bahkan beberapa program ditambahkan guna untuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan daerah.

